

**IMPLEMENTASI PROGRAM TERMINAL PARKIR ELEKTRONIK (TPE)  
UNTUK MENINGKATKAN RETRIBUSI PAJAK PARKIR  
DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT**

Jeffri Nanda Fadilah

NPP. 30.0551

*Asdaf Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat*

*Program Studi Kebijakan Publik*

Email: [jeffrinandanfadilah@gmail.com](mailto:jeffrinandanfadilah@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Mutiar Fitri Dewi, S.Pd, M.Hum

**ABSTRACT**

**Problems/Background (GAP):** (Contains the background of the research) The author focuses on the problem of Parking Tax Retribution in the City of Bandung. **Purpose:** The purpose of this study is to find out how the community uses the TPE program to facilitate parking payments through parking machines that have been provided by the government and to make it easier for the Department of Transportation to calculate the results of parking tax retribution. **Method:** This study uses a descriptive method with a qualitative approach according to Van Meter and Van Horn Theory. **Results/Findings:** The findings obtained by the authors in this study are that many people still do not have electronic cards, especially motorcyclists, perfectly active machines, friendly employees and good parking attendant responses. **Conclusion:** Good cooperation in the implementation of the TPE program. Can manage finances through BULD.

**Keywords:** *Implementation, TPE, Tax Retribution*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian) Penulis berfokus pada permasalahan Retribusi Pajak Parkir di Kota Bandung. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat dalam menggunakan program TPE unuk mempermudah dalam pembayaran parkir melalui mesin parkir yang telah di sediakan oleh pemerintah dan untuk mempermudah Dinas Perhubungan untuk menghitung hasil dari pemasukan Retribusi Pajak Parkir. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Teori Van Meter dan Van Horn. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu banyak masyarakat yang masih belum mempunyai kartu elektronik terutama pagedara motor, mesin aktif dengan sempurna, pegawai yang ramah serta respon juru parkir yang baik. **Kesimpulan:** Kerjasama yang baik dalam pelaksanaan program TPE. Dapat mengelola keuangan melalui BULD.

**Kata Kunci:** Implementasi, TPE, Retribusi Pajak

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah daerah yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemerintah daerah memiliki tugas untuk penataan daerah, hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 31 ayat 2 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kota Bandung yaitu ibukota Provinsi Jawa Barat dan merupakan kota metropolitan di Indonesia. Sebagai pusat administrasi Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung mengalami perkembangan infrastruktur seperti penambahan jumlah kendaraan yang cukup pesat.

Jumlah kendaraan di Kota Bandung terdapat baik roda dua (kendaraan motor) maupun roda empat (kendaraan mobil) dan angkutan umum. Jumlah kendaraan di Kota Bandung pada tahun 2020 sebanyak 1.538.788 unit jumlah menurun dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya berjumlah 1.524.215 unit kendaraan (Alhamdi, 2022). Banyaknya kendaraan di Kota Bandung berpengaruh pada tempat kesiapan ruang parkir. Dengan keterbatasan lokasi parkir, masyarakat cenderung memarkirkan kendaraannya di parkir tepi jalan umum/*on street* dan di tempat khusus parkir/*off street* (Utami, 2019)

Bentuk pelayanan publik di Kota Bandung yaitu e-Parkir merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan teknologi dan menjadikan daerah yang lebih unggul serta menuju *smart city*. Di Kota Bandung, sistem e-Parkir dikenal Terminal Parkir Elektronik (TPE). TPE di Kota Bandung merupakan pelopor di Indonesia (Gandapurnama, 2017)

Saat ini di Kota Bandung, terdapat 445 TPE yang tersebar di 57 ruas jalan (Miftah, 2017). Terminal Parkir Elektronik dihadirkan saat Ridwan Kamil menjabat Walikota Bandung pada tahun 2017. Pengadaan mesin parkir tersebut menghabiskan dana hingga 80 miliar rupiah yang dialokasikan dari anggaran tahun 2016. Harga per unit TPE sekitar 125 juta rupiah dengan merk Cale yang dibeli skema e-katalog (Kurniawan, 2022)

Di semua TPE terdapat sekitar 603 juru parkir yang dipekerjakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Juru parkir ini memiliki tugas untuk memberitahu pengguna kendaraan supaya menggunakan TPE yang telah disediakan dengan sistem pembayaran nontunai. Berjalannya TPE ini untuk memberikan kepercayaan masyarakat kepada juru parkir dan pemerintah dalam hal pelayanan dari kepastian tarif, keamanan dan kenyamanan bagi pemilik kendaraan. Adanya Terminal Parkir Elektronik, diharapkan mampu mempelancar parkir tarif progresif sehingga perselisihan juru parkir dengan masyarakat dapat dihindari.

### **1.2. Kesejangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Dalam permasalahan ini ada beberapa yang harus di benahi dan di panatu seperti masyarakat belum sepenuhnya memahami cara menggunakan TPE ini. Dari sisi sistem pembayaran, masih ada masyarakat yang menggunakan sistem pembayaran manual. Masyarakat yang tidak mempunyai uang elektronik dalam pembayaran tarif parkir cenderung menggunakan jalur yang mudah yaitu dengan

membayar tarif parkir secara tunai. Di tambah lagi belum adanya gerakan dari juru parkir untuk adanya mutasi dalam pendayagunaan jasa parkir dengan mengenakan tempat parkir elektronik. Dari sisi target peningkatan retribusi pajak parkir, didapatkan data bahwa pada tahun 2022 (dalam kurun waktu kurang dari tujuh bulan) target baru mencapai 6 miliar rupiah dan belum mencapai target keseluruhan sebesar 25,3 miliar rupiah atau hanya 23,95 persen (Susanto, 2022)

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang peneliti lakukan di Jalan Braga pada saat melaksanakan pesiar penulis menemukan permasalahan lain terkait TPE yaitu ada beberapa TPE yang mengalami kerusakan seperti bagian penempelan kartu dan bahkan ada yang dicorat coret oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan masyarakat mengira bahwa TPE tersebut sudah tidak berfungsi.

Sebagai tambahan permasalahan lainnya yaitu terjadinya kebocoran dari sektor parkir dan faktor lainnya semacam tidak berjalannya tarif yang stabil serta adanya parkir liar dan masih adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas di lapangan (Susanto, 2022).

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Naufal Imaduddin, 2021, yang berjudul “Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik Di Kota Bandung (Studi Tentang Program Terminal Parkir Elektronik Di Jalan Burangrang)” menjelaskan bahwa kinerja *output* dan kinerja *outcome* kebijakan terminal parkir elektronik di Kota Bandung belum terbaik karena belum tercapainya target retribusi parkir dan yang dapat memengaruhi dalam kebijakan ini yaitu inisiatif dari masyarakat dalam mendukung dampak positif. Penelitian Mudritakul Islamiyah, 2020, yang berjudul “Dampak Pengelolaan Parkir Elektronik (*E-PARKING*) Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Pusat Pembelajaran Mentaya (PPM) Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur” menjelaskan bahwa pengelolaan parkir elektronik (*E-PARKING*) di PPM Sampit sudah berjalan dengan baik dimana pengelolaannya di PPM telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam sistem pengelolaannya yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sehingga pengelolaan di PPM menjadi terstruktur. Penelitian Yoga Kukuh Jiwaraga, 2018, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah” menjelaskan bahwa implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan. Penelitian Andi Padamani, 2021, yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Terminal Parkir Elektronik Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar” menjelaskan bahwa pengaruh pengelolaan parkir elektronik terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Makassar sudah menandakan bahwa dari sektor perparkiran pengaruh pengelolaan terminal parkir elektronik berada di kategori baik.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni meningkatkan hasil pajak retribusi parkir dalam pengelolaan terminal parkir elektronik, metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif juga berbeda dengan penelitian Andi Padamani 2021. Pada

penelitian sebelumnya meneliti pendapatan asli daerah sedangkan penelitian ini cenderung ke retribusi pajak parkir. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Van Metter dan Van Horn yang menyatakan bahwa terdapat 6 indikator yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi social ekonomi dan politik, dan disposisi implementor.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi program penggunaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) untuk meningkatkan retribusi parkir serta faktor pendukung dan penghambat dalam program ini serta bagaimana upaya Dinas Perhubungan dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam program tersebut.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif menurut (MOLEONG, 2005) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan program pengguna Terminal Parkir Elektronik dan administrasi dalam pemasukan retribusi serta bagaimana mengatasi permasalahan terkait program TPE tersebut

Penelitian ini difokuskan pada implementasi program Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung. Peneliti memakai teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn, karena dalam keterkaitannya dengan implementasi kebijakan. Variabel yang dimaksud oleh Van Meter dan Van Horn ada 6 (enam) yaitu: (1) Tujuan atau ukuran kebijakan; (2) Sumber-sumber; (3) Komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan; (4) Karakteristik badan atau organisasi pelaksanaan; (5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik dan; (6) Sikap para pelaksana.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis program Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung menggunakan teori Van Metter dan Van Horn terdapat 6 indikator yaitu (1) Tujuan atau ukuran kebijakan; (2) Sumber-sumber; (3) Komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan; (4) Karakteristik badan atau organisasi pelaksanaan; (5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik dan; (6) Sikap para pelaksana.

### **3.1. Pembahasan**

#### **3.1.1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan**

Ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan salah satu faktor untuk keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Proses keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat sejauh mana tujuan program dan standar kebijakan dapat dioperasikan sesuai tolak

ukur yang ada. Oleh karena itu, ukuran-ukuran dasar dan standar tujuan-tujuan kebijakan harus sesuai demi tercapainya tujuan.

Informasi yang didapat peneliti dengan salah satu dimensi dari teori Van Metter dan Van Horn yaitu mengenai ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan dapat peneliti katakan bahwa pelaksanaan Program Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung telah memiliki visi dan misi yang telah dibuat dalam RPJMD tahun 2014-2018 untuk memajukan Kota Bandung menjadi *smart city*. Namun dalam program tersebut berjalan dengan baik namun belum optimal. Seperti masyarakat yang tidak ingin ribet dalam pembayarannya. sehingga perlu dioptimalkan dengan memberikan edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat yang baik atau membuat papan iklan yang dapat membuat masyarakat tertarik menggunakan TPE tersebut. Program tersebut akan berjalan dengan sempurna dan pencapaian pemerintahan daerah dapat terealisasikan.

### 3.1.2. Sumber-Sumber

Sumber kebijakan yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) berjalan dengan sempurna atau masih banyak kendala yang belum di selesaikan dalam menjalankan implementasi kebijakan tersebut. Program kebijakan dari pemerintah memiliki dukungan dari sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan sumber daya finansial untuk mendukung dalam pelaksanaan suatu program. Sumber daya yang mempengaruhi dalam mendukung pelayanan Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) untuk meningkatkan retribusi pajak di Kota Bandung yaitu

#### 1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan Program Terminal Parkir Elektronik ini maka Dinas Perhubungan Bandung UPT Parkir harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten dalam bekerja berdasarkan keahlian dalam bidang yang dimiliki.

**Tabel 1**

Pegawai juru parkir

Nama	Umur	Lokasi
Cecep	50 Tahun	Jalan Braga
Dadang	55 tahun	Jalan Otto Iskandar Dinata
Dedi	53 tahun	Jalan Otto Iskandar Dinata
Asep	52 tahun	Jalan Otto Iskandar Dinata

Sumber : Diolah Oleh Penulis

Peneliti juga melihat langsung cara bekerja juru parkir tersebut mereka dalam melaksanakan pekerjaan sangat bersemangat disaat ada masyarakat yang ingin mengetahui cara penggunaan TPE ini juru parkir dalam memberikan petunjuk kepada masyarakat sangat ramah dalam menjelaskan cara pemakaiannya mulai dari menghidupkan mesinnya sampai cara membayarnya menggunakan kartu hingga keluar bukti pembayarannya. Rata-rata umur yang menjadi juru parkir sudah sangat tua tetapi sangat sabar dalam menjalankan tugasnya sebagai juru parkir

## 2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana yaitu ketersediaan fasilitas untuk mendukung dalam pelaksanaan program atau kegiatan kebijakan sehingga akan menghasilkan tujuan atau tercapainya tujuan. Dalam kelengkapan dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mempermudah program Terminal Parkir Elektronik. Sarana dan prasarana ini berupa kendaraan untuk mempermudah penarikan uang kepada juru parkir yang telah diberikan kepercayaan oleh Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugasnya. Karena disetiap TPE tidak semua uang masuk ke mesin tersebut ada juga yang menggunakan uang tunai untuk pembayaran. Sarana dan prasarana selanjutnya yaitu jaringan internet sangat diperlukan untuk program Terminal Parkir Elektronik Program Terminal Parkir Elektronik agar mengetahui keadaan mesin yang berada di setiap titik yang sudah di pasang mesin parkir tersebut. Mesin ini juga dapat dipindahkan seperti lego yang dapat di bongkar pasang dari tempat yang sepi ke tempat yang ramai agar masyarakat dapat menggunakan mesin tersebut dan tidak membayar secara tunai kepada juru parkir.

## 3. Sumber Daya Finansial

Tabel 2

Laporan Realisasi Anggaran BULD UPTD Pengelolaan Perpajakan Dinas Perhubungan Kota Bandung

<b>TAHUN</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Januari</b>	445,659,919.00	269,520,911.00	519,997,013.00
<b>Februari</b>	403,372,882.00	303,534,829.00	406,770,543.00
<b>Maret</b>	1,360,662,661.00	310,767,903.00	889,831,480.62
<b>April</b>	789,421,851.00	916,549,023.00	948,320,471.00
<b>Mei</b>	20,788,233.00	296,318,517.00	317,276,359.00
<b>Juni</b>	762,614,797.00	670,564,500.00	853,125,727.00
<b>Juli</b>	272,066,886.00	187,547,886.00	852,755,419.00
<b>Agustus</b>			

	285,556,035.00	462,617,076.00	854,573,368.00
<b>September</b>	383,278,263.00	291,599,637.00	942,849,255.00
<b>Oktober</b>	212,861,605.00	871,732,231.00	991,462,537.00
<b>November</b>	216,211,583.00	565,465,119.00	1,059,515,721.00
<b>Desember</b>	1,664,612,571.00	869,523,122.00	1,092,321,907.99
<b>TOTAL</b>	<b>6,817,107,286.00</b>	<b>6,015,740,754.00</b>	<b>9,728,799,801.61</b>

Sumber: Dinas Perhubungan, 2022

Berdasarkan dari tabel di atas peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pemasukan Retribusi Parkir ini ada peningkatan di tahun 2022 namun ada penurunan di tahun 2021 yang dimana di tahun 2020 senilai Rp.6.817.107.286 miliar rupiah dan ditahun 2021 mengalami penurunan sebesar sebesar 10% dan ditahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 59% dalam pemasukannya. Pada tahun 2021 mengalami penurunan di karenakan masih ada beberapa tempat wisata yang masih ketat dalam menggunakan protokol kesehatan dan banyak masyarakat yang tidak untuk mengunjungi tempat wisata. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat bagus dikarenakan adanya kenaikan tarif parkir yang di tetapkan disetiap tempat parkir.

### **3.1.3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan**

Komunikasi yaitu salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Suatu keberhasilan kebijakan dalam mengoprasikannya tidak dapat terlepas dari komunikasi yang baik yang dilakukan oleh struktur organisasi baik dari atas sampai bawahan. Dalam pelaksana kebijakan yang baik diberlakukan persyaratan bahwa standar dan tujuan kebijakan atau program harus di pahami lalu di laksanakan oleh masyarakat

maupun organisasi yang bertanggungjawab agar tercapainya implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu perlu ada komunikasi yang baik agar standard dan tujuan kebijakan menjadi hal penting harus dikerjakan.

Peneliti dapat mendapatkan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Kota Bandung sudah memenuhi dimensi komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan tetapi belum optimal. Dari wawancara ini dapat dibuktikan bahwa terdapat kurangnya pemahaman tentang SOP yang telah diberikan kepada juru parkir yang masih harus diawasi di setiap lokasi dan harus ada beberapa tes untuk menjadi juru parkir yang amanah dan jujur dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi juru parkir dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan materi yang di berikan oleh Dinas Pehubungna UPT Parkir. Dan juga harus memberikan penegrtian kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor agar selalu membawa kartu elektronik sebagai pembayaran parkir jika di tempat lokasi terdapat mesin parkir. Selain itu sering terjadi *miscommunication* antara pelakasana Program Terminal Parkir Elektronik walaupun hanya sebagian oknum juru parkir yang melakukan kecurangan dalam bertugas. Jika ini dibiarkan akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam meningkatkan Retribusi Pajak yang masuk ke dalam kas negara atau BULD parkir. Komunikasi yang baik juga sangat penting agar dapat terlaksana dan tercapainya kejelasan standar dan tujuan kebijakan. Selain itu akurasi dalm komunikasi yang diberikan. Konsistensi atau keseragaman pemahaman insformasi sangat menentukan keberhasilan sebuah implementasi suatu kebijakan.

#### **3.1.4. Karakteristik Badan Pelaksana**

Karakteristik badan pelaksana merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan dan memiliki ciri-ciri khusus yang dimiliki dalam organisasi. Dalam implementasi tidak cukup hanya menggambarkan jumlah pelaksana suatu program tetapi



harus memperhatikan indikator, keahlian dan karakteristik badan pelaksana tersebut. Sebab itu sebuah kebijakan jika ingin tercapai berdasarkan tujuan dan sasaran maka di lingkungan birokrasi harus memiliki pembagian tugas yang jelas dan terbuka karena jika ini dilakukan maka akan adanya kepatuhan dalam bertugas dan akan melaksanakan kebijakan dengan benar dalam proses implementasi program TPE.

1. Pembagian tugas dalam pelaksanaan program TPE

Pelaksanaan tugas sudah diatur oleh Kepala Dinas Perhubungan Unit Pelaksana Teknis Parkir sesuai dengan keahlian agar dapat berjalan dengan baik. Pelaksana program TPE juga sudah pasti sesuai dengan bidang dan keahliannya.

2. Kepatuhan teradap aturan bagi para pemerintah dan organisasi dalam program TPE

Dalam kepatuhan terhadap aturan sudah baik dalam melaksanakan tugas bagi para pejabat dinas perhubungan kota bandung dan para pergawainya.

**3.1.5. Lingkungan Sosial, Ekononi dan Politik**

Kondisi lingkungan, sosial, dan politik dalam pelaksanaan suatu kebijakan merupakan faktor yang memiliki tugas dan peran bagi organisasi tersendiri. Sebuah program yang dibuat pasti ada kendala dan tantangan apabila tidak di perhatikan langung di lapangan berupa kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam hal ini meliputi sumber daya ekonomi atau keuangan untuk mendukung keberhasilan implementasi program TPE.

Tabel 3

Pegawai Dinas Perhubungan UPT Perparkiran

Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SMA/SMK	21	50,00%
Diploma	10	23,81%
Strata 1	7	16,67%

Strata 2	4	9,52%
Lainnya	0	0%
Jumlah	42	100%

Sumber: Dinas Perhubungan UPT Parkir 2022

Dalam tabel di atas paling banyak pegawai yang bekerja di Dinas Perhubungan yaitu lulusan SMA/SMK yang memiliki keahlian di bidangnya dan untuk sarjana seperti Diploma, strata 1 dan strata 2 hanya sedikit yang menduduki dikarenakan diposisikan pada bagian dalam ruangan atau bagian administrasi.

Bidang sosial kemasyarakatan sangat mempengaruhi implementasi TPE dalam hal cara berpikir masa cara berpikir masyarakat khususnya pengguna mesin parkir atau Terminal Parkir Elektronik. Dinas Perhubungan UPT Parkir juga peduli terhadap juru parkir serta mereka juga diberikan edukasi agar juru parkir paham apa tugas pokok juru parkir. Dinas Perhubungan UPT Parkir juga memberikan uang tambahan bagi juru parkir yang di tempatnya ada TPE.

Dalam Politik ini berpengaruh bagi implementasi program ini, khususnya di tingkat pemerintah Kota Bandung. Dalam hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah Kota Bandung sangat mendukung dengan adanya Terminal Parkir Elektronik ini agar menjadi *smart city* yang dicita-citakan. Pemerintah Kota Bandung sangat mendukung dengan adanya program ini karena inovasi Pak Purna Walikota Ridawan Kamil memiliki ide cermelang untuk memajukan daerahnya menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menggunakan mesin parkir elektronik ini atau Terminal Parkir Elektronik ini.

### 3.1.6. Kecenderungan Para Pelaksana

Kecenderungan para pelaksana dalam kebijakan akan berhasil jika dari sikap dan perilaku para pelaksana kebijakan dapat memahami kebijakan yang telah ditetapkan dan ikut

mendukung kebijakan itu, agar berjalan dengan baik. Pembagian komponen pelaksana kebijakan harus terdapat model kebijakan yang berdasarkan persepsi pelaksana dalam menyampaikan dan mengerjakan aturan kebijakan. kecenderungan para pelaksana dalam implementasi Program Terminal Parkir Elektronik sudah dapat dilaksanakan oleh juru parkir dengan baik tetapi hanya saja butuh pengawasan agar tidak kecurangan juru parkir dalam melaksanakan tugasnya. Untuk setiap program pasti memiliki nilai dan komitmen yang tinggi walaupun ada beberapa oknum juru parkir yang menurun dalam menjalankan tugasnya atau tidak sesuai SOP yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan Unit Pelaksana Teknis Parkir.

### **3.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat**

#### **3.2.1. Faktor Pendukung**

##### **1. Kerjasama Yang Baik Dalam Pelaksanaan Program TPE**

Dalam kerjasama yang baik tentu adanya kesepakatan dalam menentukan pelaksanaan program. Kerjasama untuk program ini seperti antara pemerintah dengan pihak swasta seperti kerjasama antara pihak jaringan dan keuangan. Dalam hal ini bahwa Dinas Perhubungan Unit Pelaksana Teknis Parkir ini menjalin kerjasama dengan baik. Karena dalam kerjasama di atas memang sudah ditata dengan sedemikian rupa agar tercapainya program ini.

##### **2. Dapat Mengelola Keuangan Melalui BULD**

Dengan adanya sumber daya keuangan sebuah program tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam implementasi Program ini agar dapat berjalan sesuai program yang telah dibuat. Dari segi keuangan Dinas Perhubungan Bandung Unit Pelaksana Teknis Parkir ini sudah menggunakan sistem BULD yang di mana sistem keuangannya sudah diterima dari parkir dan diolah sendiri oleh dinas perhubungan unit pelaksana teknis parkir ini. Dalam hal ini peraturan tersebut bahwa fungsi BULD ini diterapkan agar pemerintah daerah dapat memajukan daerahnya menjadi lebih maju serta dapat bersaing dengan daerah lain dalam mensejahterakan masyarakatnya.

#### **3.2.2. Faktor Penghambat**

##### **1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Penggunaan Terminal Parkir Elektronik**

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Jalan Braga. Masih banyak masyarakat yang tidak mau menggunakan Terminal Parkir Elektronik ini dikarenakan masyarakat Indonesia ingin serba praktis dan cepat serta tidak mau ribet dalam segala hal.

##### **2. Terdapat Terminal Parkir Elektronik yang Rusak dan Hilang**

Masih banyak oknum yang tidak bertanggungjawab dalam menjaga dan merawat barang milik Negara yang dimana itu untuk kepentingan bersama serta memajukan tanah kelahirannya atau masyarakat asli daerah dalam memajukan dan mengubah pola pikir yang lebih sejahtera dan maju.

##### **3. Kurangnya Juru Parkir dalam Menjalankan SOP**

Dalam hal ini ada oknum juru parkir yang tidak bertanggungjawab dalam menjalankan tugas yang telah diberikan kepercayaan oleh dinas perhubungan dalam menjalankan tugasnya.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Program yang di lakukan oleh pemerintah sangat bermanfaat untuk masyarakat agar mudah melakukan pembayaran secara mudah dan praktis. Dalam hal tersebut tentunya harus ada sosialisasi atau papan iklan yang menunjukkan untuk dapat menggunakan mesin parkir, seperti hal yang dilakukan oleh penggunaan tol. Temua saya dengan penelitian terlebih dahulu ada perbedaan dalam pemasukan keuangan yang dulu masih masuk ke pendapatan daerah tetapi sekarang keuangan masuk ke BULD atau kas Dinas Perhubungan untuk digunakan sebagai fasilitas lalu lintas yang perlu diperbaiki setelah itu hasil keuangan dapat di beritahukan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Seperti Mudritakul Islamiyah, 2020, yang berjudul “ Dampak Pengelolaan Parkir Elektronik (*E-PARKING*) Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Pusat Pembelajaran Mentaya (PPM) Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur penelitian ini mencari apa dampak dalam pengelolaan parkir elektronik di pusat pembelanjaan sedangkan penelitian saya mencari bagaimana tanggapan masyarakat dalam penggunaan terminal parkir elektronik untuk memudahkan pembayaran parkir.

### **3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan bahwa permasalahan yang terjadi yaitu masih banyak masyarakat yang ingin melakukan pembayaran secara praktis dan mudah dengan hal ini penulis memberikan upaya agar pembayaran dilakukan secara qris agar mempermudah pembayaran.

## **IV. KESIMPULAN**

Implementasi program Tempat Parkir Elektronik (TPE) sebagai pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah Kota Bandung untuk menjadikan Kota Bandung *smart city*. Faktor Faktor pendukung dan penghambat yaitu

Faktor pendukung: Kerjasama yang baik dalam pelaksanaan program TPE, Dapat mengelola keuangan melalui BULD. Faktor Penghambat: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan Terminal Parkir Elektroni (TPE), Terdapat Terminal Parkir Elektronik yang rusak dan hilang, Kurangnya juru Parkir dalam menjalankan SOP. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat, Memberikan kinerja yang baik dalam pelayanan secara maksimal yang sudah tersedia, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada juru parkir

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitain juga dilakukan dilaksanakan bukan hanya satu tempat dan membutuhkan waktu banyak.

**Arahan Masa Depan Penelitian (*Future Work*),** penulis menyadari awalnya melakukan penelitian. Oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang berbeda dengan program Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung dengan hasil yang lebih baik dan mendalam.

## **V. UCPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung yang telah memberikan izin untuk memeliti Dinas Perhubungan Bandung Unit Pelaksana Teknis Parkir beserta jajarannya untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian,

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Van Meter, Donald S. & Carl E. van Horn. 1975 *The Policy Implementation Process. Administration & Society Journal*.

Alhamidi, R. 2022, Agustus. *Jomplangnya Jumlah Angkutan Umum Vs Kendaraan Pribadi di Kota Bandung*. <https://www.detik.com/>.

ANDI PADAMANI, 2021, *Pengaruh Pengelolaan Terminal Parkir Elektronik Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar*

Gandapurnama, B. 2017, Juli 07. *Wajah e-Parking Bandung yang Jadi Pelopor di Indonesia*. <https://news.detik.com/>.

Kurniawan, R. 2022, 1 November. *Tarif Parkir Kendaraan di Kota Bandung Pada 2022*. <https://www.inilahnews.com/news/pr-1191586278/tarif-parkir-kendaraan-di-kota-bandung-naik-pada-2022?page=3>

Miftah. 2017, Agustus 07. *KOTA BANDUNG SEMAKIN CERDAS DENGAN TERMINAL PARKIR ELEKTRONIK*. <https://www.bandung.go.id/>.

MUDRIKATUL ISLAMIYAH, 2020, *Dampak Pengelolaan Parkir Elektronik (e-parking) Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pusat Pembelajaran Mentaya (PPM) Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur*

Naufal Imaduddin, 2021, *Efektifitas Program Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung (Studi Tentang Program Terminal Parkir Elektronik Di Jl Burangrang)*

Suherman, D. 2020. *Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung*. *Jurnal Ilmu Politik*. Vol.2 No.1 Tahun 2020, 75-76

Ulfi Dwi Nur Utami, 2019, *Efektivitas Program Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung (Studi Pada Jalan Leuwi Panjang)*

Yoga Kukuh Jiwangga, 2018, *Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)*

Moleong, Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya